



## **Fact-Checking dan Literasi Informasi Berbasis Moderasi Beragama: Strategi Deradikalisasi di Perguruan Tinggi**


**Muhammad Umar Ibnu Malik<sup>1\*</sup>, Muhammad Labib<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. A. Yani No. 40A, Purwokerto Utara, Banyumas 53126, Indonesia

\*E-mail Korespondensi: [mmmligg76@gmail.com](mailto:mmmligg76@gmail.com)

DOI: [10.24090/jpa.v26i1.2025.pp115-136](https://doi.org/10.24090/jpa.v26i1.2025.pp115-136)

<b>Submitted: 10 Juli 2025</b>	<b>Accepted: 04 September 2025</b>	<b>Published: 10 September 2025</b>
Copyright © 2025 The Authors.	Jurnal Penelitian Agama is licensed under a <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</a> .	
		

### **Abstract**

*The massive flow of digital information in higher education poses a serious risk of radical ideology dissemination. This study aims to formulate a conceptual framework for integrating fact-checking and information literacy with the values of religious moderation (wasathiyah) as a strategy for deradicalization in universities. Using a qualitative approach through literature review, this paper examines relevant studies, books, and reports that discuss the role of fact-checking in strengthening students' resilience against hoaxes, hate speech, and extremist propaganda in digital spaces. Theoretically, fact-checking is not limited to a technical process of verifying data, but also functions as an educational tool that develops critical, tolerant, and confirmatory attitudes toward truth. The findings indicate that universities need to promote information literacy integrated with moderation values to prevent radical influence, strengthen ideological resilience, and foster inclusive awareness among students. This integration is expected to serve as an effective bulwark in creating a moderate digital ecosystem within higher education institutions.*

**Keywords:** Fact-Checking; Literasi Informasi; Moderasi beragama; Deradikalisasi

### **Abstrak**

Arus informasi digital yang masif di perguruan tinggi membawa risiko serius penyebaran ideologi radikal. Penelitian ini bertujuan merumuskan kerangka konseptual integrasi fact-checking dan literasi informasi dengan nilai-nilai moderasi beragama (wasathiyah) sebagai strategi deradikalisasi di lingkungan kampus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian ini menelaah berbagai literatur, jurnal, dan laporan yang relevan terkait peran fact-checking dalam memperkuat ketahanan mahasiswa terhadap hoaks, ujaran kebencian, serta propaganda ekstremis di ruang digital. Secara teoritis, fact-checking tidak hanya dipahami sebagai proses teknis verifikasi data, melainkan juga sarana edukatif yang menumbuhkan sikap kritis, toleran, dan konfirmatif terhadap kebenaran. Temuan menunjukkan bahwa perguruan tinggi perlu mengintegrasikan literasi informasi dengan nilai moderasi beragama guna mencegah pengaruh radikal, memperkuat resiliensi ideologis, serta menumbuhkan kesadaran inklusif pada mahasiswa. Integrasi ini diharapkan menjadi benteng efektif dalam membangun ekosistem digital moderat di perguruan tinggi.

**Kata Kunci :** Fact-Checking; Literasi Informasi; Moderasi Beragama; Deradikalisasi

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial dan akademik di Indonesia. Perguruan tinggi

sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari arus informasi yang deras di ruang digital. Media sosial, yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan berbagi pengetahuan, kini juga menjadi ruang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga propaganda radikal (Putu, 2020; Fikri, 2023). Kondisi ini menjadikan mahasiswa, sebagai kelompok yang paling aktif menggunakan internet, rentan terhadap paparan ideologi ekstrem. Oleh karena itu, isu literasi digital dan upaya deradikalisasi di lingkungan kampus menjadi semakin penting untuk dikaji secara serius

Meningkatnya distribusi informasi yang semakin pesat, hal ini berimplikasi pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang terus mengonsumsi informasi setiap harinya. Hasil survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai di angka 51,8% (132,7 Juta dari 256,2 juta populasi penduduk Indonesia). 47,6% penduduk mengakses internet melalui perangkat Gadget (Putu, 2020). Sementara itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), data survey Susenas 2022 menunjukkan penduduk Indonesia yang mengakses internet mencapai 66,48%. Hal ini menjadi akar terefleksinya iklim keterbukaan informasi serta perkembangan teknologi yang diterima masyarakat dan revolusi masyarakat informasi . Sehingga demikian, seiring meningkatnya distribusi informasi yang kian masif, masyarakat sangat mudah terpapar berbagai informasi yang dikonsumsi dari aktivitasnya di internet.

Dalam hal ini, tentunya masyarakat yang dapat mengakses internet sudah tidak asing lagi dengan teknologi komunikasi yang menjadi pusat distribusi informasi di media sosial, seperti: Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Tiktok atau bahkan platform lain. Dalam perkembangannya, dampak positif yang diberikan cukup banyak. Namun, bukan berarti hanya sedikit dampak negatif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi ini, justru dengan eksistensi teknologi komunikasi meningkatkan probabilitas disinformasi, misinformasi, hoaks, *post truth* dan sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia sebelum pelaksanaan pemilu serentak 2023-2024. Dilansir dari laman Times Indonesia, hasil temuan Komite Litbang Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menunjukkan adanya peningkatan jumlah penyebaran hoaks pada tahun 2024 dari Bulan Januari-

Juli, terindikasi 2.119 hoaks dan setengahnya (48,9%) bertema politik, persentase ini mencapai hampir dua kali lipatnya dibanding 2023 yang mencapai 1.185 dan hampir mendekati semua total penemuan sepanjang tahun, yaitu sejumlah 2.330 hoaks (Fikyansyah, 2024). Demikian juga *post truth* yang beredar secara masif dalam kemasan video di konten sosial media. Penggiringan opini secara emosional ini berimplikasi pada kesadaran masyarakat yang menurun, bahkan berpengaruh pada maraknya ujaran kebencian yang spekulatif dan tidak berdasarkan fakta atau realitas sosial.

Tidak berhenti sampai di situ, pengaruh yang dihasilkan dari penyebarluasan informasi di media sosial menjadi salah satu hal yang perlu diantisipasi, hal ini yang juga yang menghasilkan gerakan-gerakan radikalisme, ekstrimisme, bahkan terorisme melalui aktivitas di internet. Dilansir dari laman antaranews.com Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengidentifikasi sejumlah gerakan radikalisme lewat media sosial. Ditemukan sebanyak 2.670 konten digital yang memuat IRET (Intoleransi, radikalisme, esktrisme, terorisme) sepanjang tahun 2023. Disamping itu Mohammed Rycko Amaleza Dahniel selaku kepala BNPT RI Komisararis Jenderal Polisi jaringan teroris global masih melaksanakan aksi terorisme serta jaringan terorisme dalam negeri juga masih terindikasi aktif dalam melakukan propaganda dengan melalui berbagai aktivitas yang dapat diketahui berdasarkan jumlah penangkapan tersangka teroris sepanjang tahun 2023 sebanyak 148 orang (Fikri, 2023). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) (dalam Ali dkk., 2021), menunjukkan indikasi mahasiswa yang terpapar mengikuti gerakan radikalisme sekitar 39% dan tiga institusi perguruan tinggi menjadi cikal bakal basis penyebaran pemahaman radikal terhadap mahasiswa. Namun, idetitasnya masih belum diinformasikan.

Berdasarkan data tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh teknologi informasi di atas, maka diperlukan upaya intensif yang dapat mencegah dampak tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa yang masih dalam tahap pencarian identitas dan jati diri kerap kali mudah terombang-ambing paham-paham yang dogmatif. Sehingga mahasiswa menjadi sasaran empuk bagi kelompok radikal dalam menginternalisasi ideologinya. Terlebih, perguruan tinggi adalah kumpulan pelajar multikultural.

Artinya, kehidupan sosial mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki latar belakang agama, budaya, dan pemikiran yang berbeda. Heterogenitas sosial ini apabila tidak diurus dengan baik dengan menciptakan kohesi sosial, maka dapat menimbulkan gesekan terhadap komunal maupun individu yang termarginalisasi yang dipengaruhi oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam hal ini moderasi beragama menjadi instrumen utama untuk diinternalisasikan. Moderasi beragama yang terintegrasi dengan literasi informasi dengan metode *fast-checking* menjadi sebuah konsep penting yang harus terapkan di setiap aktivitas mahasiswa, sebagai antithesis dari paham radikal yang menyebar luas secara masif di berbagai saluran informasi. Selanjutnya, pertanyaannya bagaimana perguruan tinggi berperan dalam memberikan pendekatan literasi informasi berbasis moderasi beragama bagi mahasiswa?

Di tengah deras arus informasi digital, kemampuan memverifikasi kebenaran konten menjadi semakin penting. Salah satu pendekatan utama adalah fact-checking, yaitu proses pemeriksaan terhadap klaim atau pernyataan berbasis data dan bukti valid, baik sebelum maupun sesudah informasi tersebar (Dziak, 2022). Proses ini mencakup pemilihan klaim yang signifikan dan faktual, pengecekan melalui sumber kredibel seperti lembaga pemerintahan atau ahli di bidangnya, hingga penggunaan tools evaluatif seperti “truth-o-meter” milik Politifact atau sistem Pinocchio dari The Washington Post (Adiprasetyo et al., 2025); (Ballotpedia, 2018). Graves (2013) bahkan menyebut *fact-checking* sebagai bentuk jurnalisme yang provokatif karena mampu memunculkan berita baru dari penilaian terhadap pernyataan publik. Di Indonesia, praktik ini dilakukan oleh media seperti Tempo.co, Kompas.com, Suara.com, dan Liputan6.com. Meski awalnya dipercaya dapat menangkal hoaks hanya dengan memberikan informasi faktual, seiring waktu tantangannya lebih kompleks, sehingga dibutuhkan sinergi antara edukasi publik dan pembangunan ekosistem literasi yang kuat (Graves, 2013; Zhang & Vos, 2019).

Sekadar memverifikasi informasi tidak cukup bila tidak dibarengi dengan pendidikan nilai. Literasi informasi yang terintegrasi dengan moderasi beragama menjadi jawaban atas tantangan ini. Literasi informasi sendiri, menurut American Library Association (ALA), adalah kemampuan mengenali kebutuhan informasi, serta

menemukan, mengevaluasi, dan menggunakannya secara efektif (Daryono, 2017). Paul Zurkowski bahkan menyebut individu yang melek informasi sebagai mereka yang terlatih memanfaatkan informasi dalam pekerjaannya (Wahyudi & Kurniasih, 2021). Dalam konteks pencegahan radikalisme, literasi informasi perlu diarahkan pada kemampuan memilah informasi, mengenali propaganda ekstrem, dan memverifikasi sumber yang kredibel. Laporan UNESCO (2016) juga menegaskan bahwa pendidikan literasi digital yang dikaitkan dengan nilai-nilai moderasi terbukti mampu melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan ekstremisme melalui internet. Buku *Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism* yang disusun oleh UNESCO, UNAOC, dan GAPMIL menegaskan peran strategis literasi media dalam menciptakan kesadaran hak asasi, wacana antaragama, dan anti-kekerasan (UNESCO, 2016).

Dalam kerangka inilah moderasi beragama (*wasathiyah*) menjadi relevan. Moderasi beragama menekankan sikap adil, seimbang, toleran, dan anti-kekerasan. Prinsip ini jika diintegrasikan dengan literasi digital dapat membentuk mahasiswa yang kritis sekaligus inklusif. Moderasi beragama berfungsi sebagai filter nilai, sehingga proses verifikasi informasi tidak hanya berhenti pada aspek teknis, melainkan juga menyentuh aspek ideologis dan etis. (Ardhana, 2023). Sementara itu, indikator implementasinya dalam konteks Indonesia mencakup komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta akomodatif terhadap budaya lokal (Muhammad & Muryono, 2021).

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran *fact-checking* sebagai bagian dari literasi informasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks pencegahan radikalisasi di perguruan tinggi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kombinasi kedua pendekatan tersebut dapat memperkuat resiliensi ideologis mahasiswa, membangun kesadaran kritis, serta menciptakan ekosistem digital kampus yang lebih moderat dan inklusif. Analisis ini tidak hanya menyoroti efektivitas *fact-checking* sebagai instrumen teknis verifikasi informasi, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka nilai-nilai moderasi yang berfungsi sebagai filter ideologis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi strategi deradikalisasi di perguruan tinggi sekaligus menawarkan

perspektif baru mengenai pentingnya integrasi literasi digital dan pendidikan nilai dalam menghadapi tantangan radikalisme di era digital.

### **Metode**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *literature review* untuk mengeksplorasi secara analitis dan mengelaborasi mengenai *conceptual framework* literasi informasi berbasis moderasi beragama yang menggunakan metode *fact-checking* sebagai upaya deradikalisasi di perguruan tinggi. Eksplorasi dalam tulisan ini menggunakan literatur relevan, yakni memanfaatkan jurnal bereputasi nasional dan internasional, buku, dan literatur lain, untuk menjelaskan secara kontekstual dan konseptual bagaimana literasi informasi berbasis moderasi beragama dapat menjadi upaya deradikalisasi di perguruan tinggi. Tahap analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*). Setiap literatur dikoding dan dikategorikan ke dalam tiga tema utama: (1) moderasi beragama sebagai nilai, (2) literasi informasi sebagai keterampilan, dan (3) *fact-checking* sebagai metode teknis.

Sumber literatur yang digunakan meliputi tiga kategori utama. Pertama, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional yang terindeks Sinta, Scopus, dan DOAJ, dengan rentang publikasi tahun 2010–2025. Artikel yang ditelaah mencakup topik moderasi beragama, literasi digital, penyebaran radikalisme, serta praktik pemeriksaan fakta (*fact-checking*) (misalnya: Ali et al., 2021; Adiprasetyo et al., 2025). Kedua, laporan institusional dari lembaga nasional maupun internasional seperti UNESCO (2016), BNPT, dan Kominfo yang menyediakan data resmi mengenai paparan radikalisme, hoaks, serta strategi pencegahannya. Ketiga, dokumen digital sekunder, khususnya praktik pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh media daring dan organisasi masyarakat sipil, seperti kanal Tempo.co/Fakta, Kompas.com/Cek Fakta, Liputan6.com/Fact Check, serta gerakan digital Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) melalui situs cekfakta.com dan akun resmi @TurnBackHoax di media sosial.

. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi, menggunakan kata kunci: “*moderasi beragama*”, “*literasi digital*”, “*radikalisme kampus*”, dan “*fact-checking*”. Data yang

terkumpul kemudian diseleksi dengan kriteria inklusi: relevan dengan tema penelitian, diterbitkan pada rentang 2010–2025, serta berasal dari sumber yang kredibel. Artikel populer tanpa dasar ilmiah dikeluarkan dari analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Radikalisasi di Perguruan Tinggi

Data menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait paparan radikalisme di kalangan mahasiswa. Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2018 melaporkan bahwa 39% mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi telah terpapar paham radikal. Angka ini semakin mengkhawatirkan dengan hasil survei nasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2020 yang menunjukkan bahwa 85% generasi milenial, yang sebagian besar merupakan mahasiswa, rentan terpapar paham radikalisme. Selain itu, data BNPT juga mencatat bahwa 16,4% pelaku terorisme memiliki latar belakang pendidikan tinggi (Tantimin et al., 2023).

Sumber Survei	Tahun	Populasi Target	Persentase Paparan Radikalisme	Persentase Perilaku Terorisme Berpendidikan Tinggi
BIN (Badan Intelijen Negara)	2018	Mahasiswa	39% terpapar paham radikal	-
BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)	2020	Generasi Milenial (mayoritas mahasiswa)	85% rentan terpapar paham radikalisme	16,4%

Tabel 1. Data Paparan Radikalisme pada Mahasiswa

Implikasi data paparan radikalisme terhadap peran strategis perguruan tinggi sangat mendalam. Angka 39% dan 85% menunjukkan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar tempat belajar, melainkan telah menjadi *hotspot* kerentanan terhadap ideologi

radikal. Fakta bahwa 16,4% pelaku terorisme berpendidikan tinggi mengindikasikan bahwa radikalisme telah berhasil menembus lapisan intelektual masyarakat (Tantimin et al., 2023).

Sedangkan di tahun 2024, tercatat temuan konten bermuatan teorisme atau radikalisme berjumlah 180 ribu konten berhasil diblokir sebagai bagian dari upaya mitigasi penyebaran radikal di dunia maya (BNPT, 2024). Selain itu, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024, BNPT menekankan bahwa program Kampus Kebangsaan menjadi salah satu strategi utama untuk memperkuat ketahanan ideologis di perguruan tinggi (FKPT, 2024). Temuan ini mengonfirmasi bahwa kampus tidak hanya menjadi titik rawan penyebaran paham ekstrem, tetapi juga harus menjadi benteng moderasi dan literasi digital.

Kondisi ini menuntut perguruan tinggi untuk tidak hanya menjadi *center of excellence* dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga "garda terdepan" dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berfungsi sebagai "laboratorium perdamaian" (Hefni, 2020). Kegagalan dalam mengatasi masalah ini dapat mengancam keamanan nasional dan masa depan bangsa secara keseluruhan, mengingat peran strategis kaum intelektual dalam pembangunan

Menurut Asrori 2017 (dalam Ali dkk., 2021), setidaknya ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi munculnya paham radikal di Indonesia yakni yang pertama; perkembangan radikal terkini yang berada ditingkat global, kemunculan paham wahabisme dan penyebaran aliran tersebut, dan yang terakhir tingkat kemiskinan. Selain itu, menurut Wiktorowicz 2005, menyatakan tentang tahapan seseorang yang terpapar mengikuti paham radikalisme yakni:

a. Pembukaan kognitif

yakni dimana individu membuka pemikirannya terhadap ilmu pengetahuan, ide atau gagasan, *insight*, serta pengalaman baru yang benar dalam persepektifnya sehingga meninggalkan sudut pandang lama yang sudah pernah diperoleh.

b. Mencari spiritualitas

yakni dimana seseorang mencari interpretasi dari makna-makna keagamaan dengan mengikuti berbagai aktivitas keagamaan seperti ceramah, forum diskusi baik forum terbuka maupun forum tertutup. Dalam hal ini, kelompok radikal yang

memiliki kredibilitas akan membawa doktrin-doktrin keagamaan terhadap individu yang dalam artian masih rentan dan mudah dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman keagamaan yang radikal.

c. Tahap framing (pemingkaian)

yakni dimana seseorang yang memiliki kredibilitas atau kedudukan memberikan doktrin propaganda atau ceramah untuk mempengaruhi individu yang rentan terhadap dogma keagamaan. Sehingga para kelompok radikal menggunakan berbagai metode retorika persuasif dan agitatif yang meliputi dalil agama untuk memberikan keyakinan terhadap individu yang rentan.

d. Tahap sosialisasi

dalam tahap ini individu mendapatkan petunjuk dari dogma agama, memfasilitasi indoktrinasi, membuat identitas eksklusifitas, dan merevolusi nilai keyakinan dalam dirinya.

e. Tahap internalisasi

sudah dapat memahami dan memperdalam suatu ideologi yang dianggapnya benar. Ketika seorang individu yang rentan telah melakukan tahapan tersebut, ia akan tergabung dalam gerakan radikal dan membentuk identitas dirinya yang eksklusif (M. N. Ali dkk., 2021).

Penyebaran radikalisme di lingkungan kampus dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Media sosial menjadi saluran utama penyebaran ideologi radikal. Keberadaan media sosial sebagai pedang bermata dua dalam penyebaran ideologi terbukti signifikan. Meskipun media sosial membuka peluang untuk memperluas wawasan agama, ia juga menjadi saluran utama penyebaran ideologi radikal dan intoleran. Algoritma media sosial cenderung mendorong konten yang bersifat sensasional, termasuk ujaran kebencian. Hal ini menciptakan lingkungan di mana mahasiswa, yang mungkin belum memiliki filter kritis yang cukup kuat, rentan terpapar narasi sempit yang memecah belah. Ini bukan hanya masalah akses informasi, tetapi juga masalah bagaimana informasi *disajikan* dan *dikonsumsi*, menuntut pendekatan yang lebih canggih daripada sekadar memblokir situs (Tri Wibowo & Hadiningrat, 2023).

Dari sisi komunikasi massa, penyebaran radikalisme di media sosial tidak hanya bergantung pada konten, tetapi juga algoritma platform. Penelitian Zhang & Vos (2019) menunjukkan bahwa isu yang sensasional lebih cepat viral dibanding pesan moderat. Hal ini menjelaskan mengapa propaganda radikal lebih dominan di ruang digital dibanding konten moderasi. Karena itu, literasi digital mahasiswa perlu diarahkan tidak hanya pada kemampuan membaca teks, tetapi juga memahami mekanisme distribusi informasi di platform digital (Zhang & Vos, 2015). Dari sudut pandang teknologi informasi, praktik fact-checking menjadi instrumen penting dalam memverifikasi klaim yang beredar. Tools seperti *truth-o-meter* Politifact atau *Pinocchio Test* Washington Post membuktikan bagaimana teknologi dapat membantu masyarakat memilah fakta (M, 2022). Di Indonesia, inisiatif ini direplikasi melalui platform *cekfakta.com* dan kanal media daring. Akan tetapi, efektivitasnya masih terbatas jika tidak diintegrasikan dengan pendidikan nilai dan etika digital di kampus.

## **2. Fact-Checking dan Literasi Informasi Berbasis Moderasi Beragama**

*Fact-checking* merupakan sebuah proses verifikasi akurasi dari laporan, pernyataan, atau informasi secara faktual, baik sebelum atau bahkan sesudah konten didistribusikan. *Fact-checking* bertujuan untuk mencari bukti yang mendukung adanya klaim dan juga mengidentifikasi konten yang menyesatkan atau palsu (Dziak, 2022). Adapun metodologi *fact-checking* meliputi beberapa hal, yakni di antaranya (Adiprasetio et al., 2025):

- a. Kriteria pemilihan klaim: klaim yang dipilih untuk verifikasi yang berakar pada fakta dan dapat ditinjau secara faktual (bukan sekedar opini), signifikan, serta kemungkinan akan diteruskan oleh publik dan menimbulkan pertanyaan “apakah itu benar?”.
- b. Metode penelitian: penelitian umumnya dimulai dengan menghubungi sumber klaim untuk mengklasifikasi atau sebagai data pendukung. Lebih lanjut, *checking* melalui sumber pendukung seperti artikel, wawancara *on-record* dengan responden atau ahli di bidangnya. Penggunaan sumber non-partisan sebagai lembaga pemerintahan sangat direkomendasi.

- c. Evaluasi klaim: organisasi yang memiliki basis *fact-checking* sering menggunakan tools untuk menunjukkan tingkat kebenaran klaim informasi, seperti “*truth-o-meter*” Politifact (yang memiliki fitur dari “*TRUE*” hingga “*PANTS ON FIRE*”. Atau bahkan sistem Pinocchio the Washington Post Fact Crecker. Prinsip ini meliputi perhatian dengan cermat terhadap susunan kata, konteks yang penuh pernyataan, dan beban pembuktian yang ada pada orang pembuat klaim faktual (Ballotpedia, 2018).

Graves (2013) mengatakan, *fact-checking* adalah jenis jurnalisme yang provokatif. Pemeriksaan fakta mengambil pernyataan dari berita, menganalisisnya, dan mengubahnya menjadi berita baru—yang menilai pernyataan tersebut, dan setidaknya secara implisit, pembicaraannya (Graves, 2013) di Indonesia diketahui 2016 silam, sewaktu misinformasi dan disinformasi terjadi dengan memunculkan permasalahan yang kompleks. Mulanya, masifnya hoaks dapat dicegah melalui literasi informasi jika publik mendapat informasi yang lebih faktual. Tetapi, seiring waktu, menyediakan informasi yang faktual tidak cukup menjawab tantangan tersebut. Hal ini memerlukan pendidikan literasi yang kuat, di samping ekosistem pemeriksaan fakta yang akurat di berbagai daerah dengan kebutuhan dan karakter *sosio-cultural* pada masing-masing daerah.

Dalam konteks ini, tantangan yang sering dihadapkan di ruang public adalah *fake news*. Istilah ini mendefinisikan berita palsu yang sering disalahgunakan dan mengarang informasi sensasional, baik itu di media sosial dan platform lain, sehingga dapat dengan mudah menarik atensi publik yang menggunakan media sosial untuk keuntungan pihak tertentu (Fardiah et al., 2022). Dengan demikian, untuk mencegah adanya berita palsu untuk membongkar distribusi informasi yang mengandung hoaks dan penggiringan opini, maka diperlukan sebuah upaya dalam proses pengecekan fakta yang sama dengan verifikasi informasi.

Di Indonesia, *fact-checking* tidak jauh beda dengan pengecekan fakta pada umumnya. Hal ini bisa diakses melalui empat media yang aktif dalam *fact-checking*, yakni di antaranya: *Liputan6.com*, *Tempo.co*, *Kompas.com*, dan *Suara.com*. Zhang & Vos (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “*How and Why Some Issues Spread Fast in Social Media*”, mengungkapkan, berkembangnya media dapat memudahkan

masyarakat mendistribusikan informasi secara masif. Media sosial dalam hal ini, dapat menjadi tools baru untuk berbagi pandangan. Sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka, menggambarkan pengalaman dan berbagi apa yang mereka rasakan (Zhang & Vos, 2019).

Tentunya, *fact-checking* sangat erat kaitannya dengan literasi informasi. Terlebih, literasi informasi di era digital merupakan skill yang diperlukan di abad 21. Literasi informasi pertama kali dicetuskan oleh Paul Zurkowski, yang menyatakan bahwa individu yang memahami informasi adalah individu yang terlatih dan mampu mengimplementasikan sumberdaya di dalam pekerjaannya (Wahyudi & Kurniasih, 2021). Literasi informasi kerap kali disebut dengan “melek informasi” yang berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengakses informasi, memverifikasi, dan memanfaatkan informasi dengan baik. Menurut *American Library Association (ALA)*, menjelaskan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat diperlukan bagi individu untuk mampu mengenali waktu yang tepat informasi yang dibutuhkan, serta dapat mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif (Daryono, 2017). Dalam pencegahan radikalisme, literasi informasi menjadi sebuah gerakan untuk mampu memilah informasi yang akurat dengan memverifikasi sumber yang memiliki kredibilitas. Sehingga tidak terpapar oleh propaganda maupun berita-berita dengan narasi yang ekstrem. Literasi informasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai moderasi beragama berperan sebagai penyeimbang di tengah bias penyebaran arus informasi. Oleh sebab itu, mahasiswa yang notabeneanya adalah masyarakat majemuk (multikultural) perlu dilatih untuk memahami peredaran informasi di internet yang kerap kali jadi makanan sehari-hari. Mereka harus dilatih untuk menganalisis konten dan memahami konteks informasi, terutama dalam konteks isu agama maupun ideologi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh UNESCO 2016, menunjukkan bahwa pendidikan literasi digital dapat mengatasi perilaku radikalisme dan ekstremisme yang terjadi di internet. Hal ini dikaitkan dengan nilai-nilai moderat yang dapat menangkal kerentanan generasi muda terhadap radikalisme. Penanaman literasi informasi dalam mengatasi radikalisme dimuat dalam buku tahunan yang berjudul

*“Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism.”* Sebagai Kerjasama antara UNESCO, UNITWIN *Cooperation Programme on MILID, the United Nations Alliance for Civilizations (UNAOC)*, dan *the Global Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy (GAPMIL)*. Buku ini menawarkan perspektif di media dan literasi informasi (MIL) dari seluruh dunia. Isi dalam buku ini diklasifikasi menjadi beberapa bagian; Pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan; Ujaran Kebencian dan Hasutan; Radikalisasi dan Ekstremisme; Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Gender; dan Wacana Antar-Agama dan Antar-Budaya di Media (UNESCO, 2016).

Berkaitan dengan antri ekstrimisme, sebuah konsep yang menegaskan upaya perdamaian antar agama, etnis, dan keberagaman adalah moderasi atau sikap moderat. Menurut Lukman Hakim moderat adalah suatu sikap seseorang yang wajar, tidak berlebihan atau biasa-biasa saja, dan tidak berperilaku ekstrim. Ia menambahkan kata moderat dalam penafsiran Bahasa Inggris yakni *Moderation* yang seringkali diunakan dalam pengertian *average, core, standard*, ataupun *non-aligned*. Dalam hal ini, kata moderat dapat dipahami dengan makna yang menitikberatkan pada equilibrium sosial, diantaranya dalam hal keyakinan atau kepercayaan, moral, sikap, dan watak yang menyangkut perilaku terhadap individu maupun kolektif (Nurdin, 2021). Selain itu, kata moderasi dalam Bahasa Arab dikenal dengan kata *wasath* atau *Wasathiyah* yang merupakan padanan kata dari kata *tawasuth* (tengah-tengah), *I’tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Secara eksplisit kata tersebut dapat memiliki makna jalan tengah, terpilih, atau kuat. Kata *wasath* sendiri telah disebutkan sebanyak lima kali dalam Al-Qur’an, yakni terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah 143 dan 238, Q.S. Al-Maidah 89, Q.S. Al-Qalam 28, dan Q.S. Al-‘Adiyat 5. Dari ayat tersebut kata *wasath* dapat memiliki makna tengah, adil, dan pilihan.

Kata *wasath* dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 143 menggambarkan umat Islam sebagai umat yang berkeadilan dan seimbang. Konsep ini menjadi pedoman agar umat Islam menempatkan diri sebagai penengah, tidak condong pada ekstremitas kiri maupun kanan, serta berani mengambil sikap adil dalam menghadapi persoalan. Al-Raghib al-Ashfahani dalam *Mufradat Alfazh al-Qur’an* menafsirkan *wasathiyah* sebagai posisi tengah yang menyatukan dan menjadi penyeimbang dalam suatu komunitas. Seorang

muslim yang mengamalkan nilai ini disebut *wasith*, yaitu sosok yang berfungsi sebagai mediator dalam menjaga harmoni sosial (Al-Aṣḥānī, 2009).

Dalam pengembangannya, istilah *wasathiyah* dipadankan dengan moderasi, yaitu sikap toleran dan berimbang yang menghindarkan umat dari sikap ekstrem dan radikal. As-Shallabi menekankan bahwa Islam *wasathiyah* mencakup dua aspek penting: *khairiyah* (kebaikan) dan *bayniyah* (pertengahan) (Mayasari Siregar dkk., 2022). Hal ini mengisyaratkan bahwa moderasi bukan hanya posisi netral, tetapi juga praksis kebaikan yang berfungsi membangun keadilan sosial.

Analisis ini menegaskan bahwa *wasathiyah* tidak cukup dipahami sebatas definisi normatif, melainkan harus diinternalisasikan dalam praktik literasi informasi. Ketika nilai *wasathiyah* digabungkan dengan kemampuan fact-checking, mahasiswa dapat mengembangkan sikap kritis dan adil dalam menilai informasi, sekaligus menolak narasi radikal yang intoleran. Dengan demikian, *wasathiyah* bukan sekadar konsep teologis, melainkan kerangka praktis dalam strategi deradikalisasi di perguruan tinggi.

Dalam konteks ini, penting untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme yang dapat diatasi dengan literasi informasi berbasis moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi peran penting dalam konteks ini, karena nilai-nilai yang terkandung dalam moderasi beragama menekan pentingnya memahami esensi ajaran agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang, menjadi penengah di antara perbedaan, dan sebagai alat untuk mencegah radikalisme. Ajaran-ajaran agama sejatinya mengajarkan perdamaian dan kebajikan yang dipahami serta diaplikasikan secara kontekstual seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana dalam Indikator moderasi beragama terbagi menjadi 10 prinsip, yakni di antaranya: 1) *Tawasuth*, 2) *Tawazun*, 3) *Tasamuh*, 4) *I'tidal*, 5) *Musawah*, 6) *Syura*, 7) *Islah*, 8) *Aulawiyah*, 9) *Tathawur wa Ibtikar*, dan 10) *Tahadhur*. Semua prinsip tersebut termuat dalam konsep *Wasathiyah* yang memiliki makna jalan tengah atau mengambil sikap tengah (Ardhana, 2023). Berdasarkan konsetual di Indonesia, ada empat indikator dalam mengukur penerapan moderasi beragama, yakni (Muhammad & Muryono, 2021):

- a. Komitmen kebangsaan
- b. Level toleransi

- c. Anti-radikalisme dan anti-kekerasan
- d. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, literasi informasi berbasis moderasi beragama menjadi upaya preventif untuk memberikan internalisasi tentang sikap toleransi di era digital. Literasi informasi berfungsi sebagai upaya untuk memverifikasi informasi dan mengolahnya untuk lebih terbuka pada informasi dan melakukan konfirmasi serta mengidentifikasi hal-hal yang menggiring opini publik. Sehingga dengan adanya integrasi literasi informasi berbasis moderasi beragama, maka individu akademisi akan lebih verifikatif dan konfirmatif terhadap berita atau informasi yang ditangkap.

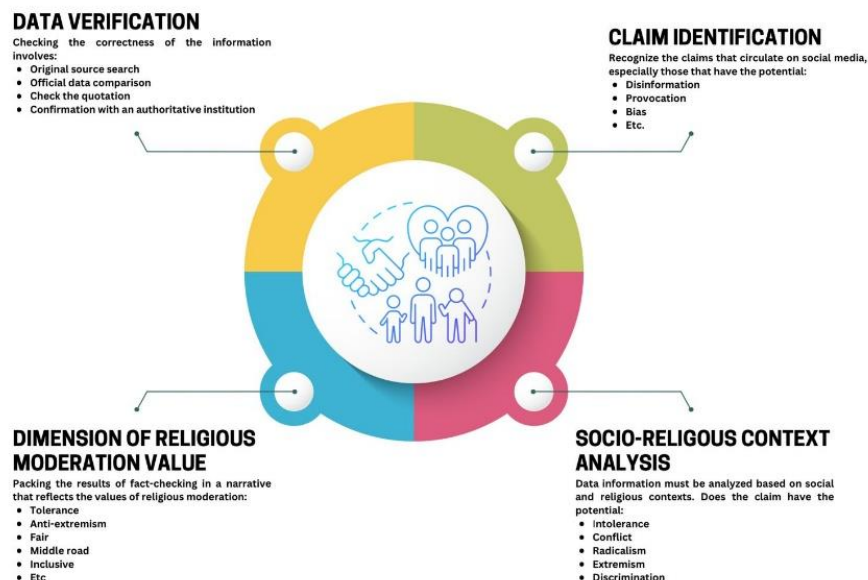
### **3. Metode *Fact-Checking* dalam Literasi Informasi Berbasis Moderasi Beragama sebagai Upaya Deradikalisasi di Perguruan Tinggi**

Di era disinformasi digital, metode *fact-checking* menjadi satu pilar yang penting dalam mengonstruksi literasi informasi. Hal ini termasuk dalam konteks sosio-religioun di Indonesia, penyusutan dan penyebaran berita hoax dengan membawa agama, etnis, kelompok, organisasi, ras, menjadi tantangan yang serius dan mengancam kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural. Maka, dalam konteks ini, pendekatan *fact-checking* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dapat dibingkai dengan kerangka nilai, seperti moderasi beragama. Sebagai paradigma yang menekankan pada sikap tengah, adil, toleran menjadi fundamental etis dalam menilai kebenaran informasi yang berbasis keagamaan. Sehingga, *fact-checking* di sini tidak hanya berfungsi sebagai verifikasi data, namun juga mempertimbangkan implikasi sosial dan nilai harmonisasi antar umat beragama.

Di Indonesia, terdapat dua kategori organisasi pemeriksa data sampai saat ini. Kategori pertama adalah organisasi media yang melakukan pemeriksaan fakta dengan menyediakan kanal khusus untuk factchecking journalism. Kategori ini ditemukan pada Tirto, salah satu media daring di Indonesia yang digandeng oleh Facebook sebagai third party fact checking dan telah terakreditasi oleh International Fact Checking Network (IFCN) pada Januari 2018. Selain Tirto, sejumlah media lain di Indonesia juga menyusul tersertifikasi oleh IFCN, yaitu Cek FaktaLiputan 6, Tempo.co, dan Hoaks atau Fakta-Kompas.com. Kategori yang kedua adalah organisasi asosiasi, baik dari media

maupun non-media. Di Indonesia, kategori kedua ini ditemukan pada Cekfakta.com yang diinisiasi oleh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Google News Initiative serta First Draft.

Metodeologi *fact-checking* dalam kerangka literasi informasi berbasis moderasi beragama dapat dilakukan dengan mencakup beberapa tahap; *Pertama*, mengidentifikasi klaim, yakni mengenali pernyataan yang mengandung potensi disinformasi. *Kedua*, verifikasi data, dengan merujuk pada sumber otoritatif seperti lembaga keagamaan, akademisi, dan basis data resmi. *Ketiga*, analisis konteks sosial dan keagamaan yang menyertai klaim tersebut. Dalam tahapan ini, nilai pada prinsip moderasi digunakan untuk menilai apakah suatu klaim berpotensi mengasut, menyesatkan, dan memecah belah. Maka, dengan demikian metodologi ini tidak hanya bersifat teknis pada platform *fact-checking* pada umumnya, misalnya, platform CekFakta.com. Tetapi, melibatkan dimensi etika dan *socio-cultural* (Wardle & Derakhshan, 2017).



Gambar 1. Framework Fact-Checking Religious Moderation

Integrasi moderasi beragama dengan metodologi *fact-checking* memberikan kerangka normatif untuk menjaga objektivitas dan mempertimbangkan nilai-nilai

kemanusiaan. Misalnya, ketika sebuah klaim bernuansa agama yang menyinggung soal minoritas, pendekatan moderat menghindari proses verifikasi informasi yang kaku dan semata-mata teknis saja. Namun, menekankan pentingnya dialog lintas keyakinan dan sensitivitas sosial. Dengan begitu, *fact-checking* tidak hanya menjadi alat untuk mmbungkan opini, tetapi menjadi instrument kepada masyarakat yang edukatif dengan mengedepankan telaah kritis dan inklusif. Hal ini selaras dengan pendekatan *constructive journalism* yang mengedepankan pada rekonstruksi sosial, bukan hanya sekedar klarifikasi informasi (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Integrasi *fact-checking*, literasi informasi, dan moderasi beragama menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk upaya deradikalisasi di perguruan tinggi. Literasi informasi, dengan kemampuannya untuk mengevaluasi sumber dan konten, adalah prasyarat penting untuk memahami moderasi beragama secara kritis, bukan hanya dogmatis. Mahasiswa yang literat informasi dapat membedakan antara ajaran agama yang otentik dan interpretasi yang menyimpang atau radikal (Juraidi & Witro, 2024).

*Fact-checking*, dengan metodologi verifikasi dan penilaian nuansa kebenaran, dapat diterapkan untuk mengevaluasi klaim keagamaan yang ekstrem atau menyesatkan. Ini membantu mahasiswa mengidentifikasi propaganda radikal yang seringkali dibungkus dengan narasi agama yang salah atau konteks yang dipelintir. Moderasi beragama, pada gilirannya, memberikan kerangka nilai etis dan epistemologis (toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, keadilan, keseimbangan) yang memandu proses literasi informasi dan *fact-checking* dalam konteks keagamaan. Ini memastikan bahwa analisis informasi tidak hanya faktual tetapi juga etis dan inklusif, mencegah mahasiswa jatuh ke dalam fanatisme buta atau pandangan eksklusif.

Literasi informasi berbasis moderasi beragama berfungsi sebagai penangkal "post-truth" agama. Di era "post-truth" di mana emosi dan keyakinan pribadi sering mengalahkan fakta, radikalisme agama berkembang subur dengan memanipulasi teks dan narasi keagamaan. Integrasi *fact-checking* dan literasi informasi dengan moderasi beragama menciptakan mekanisme internal bagi mahasiswa untuk tidak hanya memverifikasi "fakta" (misalnya, kutipan ayat), tetapi juga mengevaluasi *interpretasi* dan *konteks* dari fakta tersebut berdasarkan prinsip-prinsip moderasi. Ini membantu

mereka menghindari fanatisme buta dan memahami bahwa kebenaran hakiki hanya milik Tuhan, sementara tafsir manusia bersifat relatif (Rahmawan et al., 2022).

Membangun ekosistem digital moderat melalui inovasi pedagogi adalah pendekatan yang krusial. Mengandalkan metode konvensional saja tidak cukup untuk menjangkau generasi digital. Strategi inovatif seperti kolaborasi dengan *influencer*, pengembangan aplikasi, dan integrasi kurikulum digital menunjukkan pergeseran ke arah pembangunan ekosistem digital yang secara proaktif menyemai narasi moderat. Ini adalah upaya untuk "merebut panggung ruang digital" dari narasi radikal, bukan hanya meresponsnya.

Moderasi di sini menjadi strategi kultural dan epistemologis yang relevan, sebab hal ini bukan hanya sekedar sikap, tetapi strategi kebudayaan dan kerangka epistemologis yang mengintegrasikan nilai kemanusiaan, kebangsaan, kearifan loka dengan ajaran agama. Hal ini melampaui pendekatan hukum represif dengan membangun daya tahan ideologis dari dalam, melalui pemahaman agama yang seimbang sebagai upaya mencegah konflik beragama. Dengan indikator prinsip moderasi beragama (Kemenag, 2019) yang diinternalisasikan sebagai landasan epistemologis tentang menghargai keberagaman dan memegang teguh Pancasila sebagai komitmen kebangsaan, mahasiswa dapat mengerti arti dari multikulturalisme di sekitarnya. Kemudian toleransi dengan menghormati tanpa memaksakan keyakinan. Selanjutnya, anti kekerasan dan menolak segala tindakan ekstrimisme, serta akomodatif terhadap perbedaan tradisi budaya dan kearifan lokal (Ardhana, 2023).

Keberhasilan integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam lingkungan kampus sangat bergantung pada sinergi peran seluruh civitas akademika. Pimpinan universitas berperan sebagai motor kebijakan sekaligus figur teladan dalam membangun budaya akademik yang inklusif dan bebas dari paham ekstrem. Hal ini mencakup penguatan regulasi yang mendukung semangat bela negara, pemberdayaan organisasi kemahasiswaan seperti UKM dan BEM, serta kerja sama strategis dengan lembaga terkait seperti BNPT. Di sisi lain, dosen dituntut memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip moderasi dan mampu menanamkannya dalam proses pembelajaran, sekaligus menunjukkan sikap moderat dalam keseharian akademik.

Mahasiswa, sebagai agen perubahan, memiliki tanggung jawab untuk aktif dalam kampanye toleransi, membangun ruang dialog lintas agama, dan meningkatkan kapasitas literasi digital mereka dalam menangkal informasi yang menyesatkan. Kolaborasi ketiga elemen ini akan menciptakan ekosistem kampus yang tangguh terhadap infiltrasi ideologi radikal dan mendorong terciptanya masyarakat akademik yang harmonis dan berpikiran terbuka (Antika et al., 2024).

Berdasarkan analisis literatur dan hasil kajian, integrasi fact-checking dengan literasi moderasi beragama dapat dipandang cukup ampuh dalam meredam potensi radikalisme di perguruan tinggi. Efektivitas ini tampak dari beberapa aspek. Pertama, mahasiswa yang terbiasa melakukan verifikasi fakta cenderung memiliki daya kritis lebih tinggi dalam menanggapi isu-isu sensitif yang sering dipakai kelompok radikal untuk memicu kebencian. Kedua, penanaman nilai moderasi beragama melatih mahasiswa bersikap adil, seimbang, dan toleran, sehingga mampu menolak narasi eksklusif dan mengedepankan sikap inklusif. Ketiga, penggabungan kedua pendekatan ini bukan hanya membentuk kemampuan teknis dalam memilah informasi, tetapi juga membangun fondasi etis yang memperkuat resiliensi ideologis mahasiswa.

Meskipun penelitian ini bersifat konseptual, indikasi dari berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa integrasi fact-checking dan moderasi beragama dapat menjadi strategi preventif yang relevan dan adaptif terhadap tantangan era digital. Perguruan tinggi yang mengimplementasikan pendekatan ini berpotensi melahirkan ekosistem akademik yang lebih sehat, dimana mahasiswa tidak mudah terprovokasi isu radikal dan mampu mengembangkan kesadaran kritis dalam menyaring informasi. Dengan demikian, fact-checking yang dibingkai oleh nilai-nilai moderasi dapat dipandang sebagai langkah strategis dalam upaya deradikalisasi yang berorientasi pada pencegahan sekaligus penguatan karakter mahasiswa.

## **Simpulan**

Radikalisme di perguruan tinggi menjadi problem serius yang menuntut perhatian, mengingat tingginya kerentanan mahasiswa terhadap penyebaran ideologi ekstrem di ruang digital. Upaya deradikalisasi tidak dapat hanya mengandalkan kontrol eksternal, tetapi harus dibangun melalui penguatan kapasitas internal

mahasiswa. Integrasi literasi informasi berbasis moderasi beragama dengan metode fact-checking menawarkan pendekatan strategis untuk mencegah pengaruh radikal. Literasi moderasi beragama membekali mahasiswa dengan sikap adil, seimbang, dan toleran, sementara fact-checking melatih mereka memverifikasi kebenaran informasi secara kritis dan objektif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kombinasi keduanya mampu memperkuat resiliensi ideologis mahasiswa, menumbuhkan kesadaran kritis, serta menciptakan ekosistem digital kampus yang inklusif dan moderat. Dengan demikian, perguruan tinggi berpotensi menjadi garda terdepan dalam upaya deradikalisasi berbasis literasi digital dan nilai-nilai moderasi.

### Daftar Pustaka

- Adiprasetio, J., Rahmawan, D., Wibowo, K. A., Yudhapramesti, P., & Hartoyo, N. M. (2025). Epistemological problems in fact-checking practice: evidence from Indonesia. *Media Practice and Education*, 26(1), 36–57. <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.2341338>
- Al-Aṣṣfahānī, A.-R. (2009). *Al-Mufradāt fī gharīb al-Qurʿān* (S. A. Dāwūdī (ed.)). Dār al-Qalam.
- Ali, M. N., Bakri, R., Aryuni, M., & Effendy, . (2021). An Analysis of Psychological Dynamics and Factors Causing the Formation of the Radicalism Attitude Among University Students in Palu. *Journal of Educational and Social Research*, 11(6), 34. <https://doi.org/10.36941/jesr-2021-0126>
- Antika, C., Wibowo, T., Ghiffari, R., Adhwa, T. L., Purwati, R., Syariah, E., Islam, U., Bangsa, B., Anak, P., Dini, U., Islam, U., Bangsa, B., Konseling, B., Islam, P., Islam, U., Bangsa, B., Guru, P., & Madrasah, M. (2024). Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 39355–39363.
- Ardhana, I. A. (2023). Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer. In *Kuriotas* (Vol. 13). [https://balitbangdiklat.kemendiknas.go.id/resensi/moderasi-beragama-di-tengah-isu-kontemporer-2023%0Ahttps://eperpus.kemendiknas.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=43989](https://balitbangdiklat.kemendiknas.go.id/resensi/moderasi-beragama-di-tengah-isu-kontemporer-2023%0Ahttps://eperpus.kemendiknas.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=43989)
- Ballotpedia. (2018). *The methodologies of fact-checking*. Ballotpedia.Org. [https://ballotpedia.org/The\\_methodologies\\_of\\_fact-checking](https://ballotpedia.org/The_methodologies_of_fact-checking)
- BNPT. (2024). *180 Ribu Konten Bermuatan Terorisme Diblokir Sepanjang 2024*. BNPT RI. <https://www.bnpt.go.id/bnpt-180-ribu-konten-bermuatan-terorisme-diblokir-sepanjang-2024>
- Daryono, D. (2017). Literasi Informasi Digital : Sebuah Tantangan bagi Pustakawan. *Tik Ilmu : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 1(2), 89. <https://doi.org/10.29240/tik.v1i2.282>
- Dziak, M. (2022). *Critical Skills: Fact-checking*. EBSCO. <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass->

- media/critical-skills-fact-checking
- Fardiah, D., Darmawan, F., & Rinawati, R. (2022). Fact-checking Literacy of Covid-19 Infodemic on Social Media in Indonesia. *Komunikator*, 14(1), 14–29. <https://doi.org/10.18196/jkm.14459>
- Fikri, M. S. (2023). *BNPT temukan 2.670 konten radikalisme dan terorisme sepanjang 2023*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3892506/bnpt-temukan-2670-konten-radikalisme-dan-terorisme-sepanjang-2023>
- Fikyansyah, A. (2024). *Ribuan Hoaks Beredar Sepanjang Januari-Juli, Separuhnya Soal Politik*. Times Indonesia. <https://timesindonesia.co.id/cek-fakta/510967/ribuan-hoaks-beredar-sepanjang-januarijuli-separuhnya-soal-politik>
- FKPT. (2024). *Penguatan Kampus Kebangsaan, Upaya BNPT Perkuat Public Resilience di Lingkungan Kampus dari Paham Radikalisme-Terrorisme*. FKPT Center. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). <https://fkptcenter.id/penguatan-kampus-kebangsaan-upaya-bnpt-perkuat-public-resilience-di-lingkungan-kamp>
- Graves, L. (2013). *Deciding What's True: Fact-Checking Journalism and the New Ecology of News*. Columbia University.
- Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 7–20.
- Juraidi, I. M., & Witro, D. (2024). Transformasi Moderasi Beragama Berbasis Digital 2024: Sebagai Bentuk Upaya Memfilter Konten Radikalisme dan Ekstremisme di Era Disrupsi. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1).
- Kemenag. (2019). *TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *The elements of journalism : what newspeople should know and the public should expect*. Crown Publishers.
- M, D. (2022). *Critical Skills: Fact-checking*. EBSCO Research Starters. <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/critical-skills-fact-checking>
- Muhammad, A., & Muryono, S. (2021). *Agus Muhammad and Sigit Muryono, Jalan Menuju Moderasi Modul Penguatan Moderasi Beragama Bagi Guru* (A. Masykur (ed.); Cendikia.K). Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Putu, I. G. S. (2020). GERAKAN LITERASI DIGITAL PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Stilistika*, 8(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3884420>
- Rahmawan, D., Hartanto, R., & Garnesia, I. (2022). Multi Case Analysis on The Development of Fact-Checking Organizations in Indonesia. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 10(1), 14. <https://doi.org/10.24198/jkk.v10i1.38752>
- Tantimin, T., Situmeang, A., & Agustin, I. C. (2023). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT ) dalam Menanggulangi Radikalisme dan Terorisme di Indonesia The Role of the National Counterterrorism Agency ( BNPT ) in Overcoming Radicalism and Terrorism in Indonesia. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 354–383.
- Tri Wibowo, K., & Hadiningrat, W. (2023). Penanggulangan Penyebaran Radikalisme Melalui Media Sosial dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(2), 187–212. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i2.304>
- UNESCO. (2016). *Media and information literacy: reinforcing human rights, countering radicalization and extremism* (J. Singh (ed.)). United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization.

- Wahyudi, D., & Kurniasih, N. (2021). LITERASI MODERASI BERAGAMA SEBAGAI REAKTUALISASI “JIHAD MILENIAL” ERA 4.0. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v1i1.3287>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making*. Council of Europe.
- Zhang, B., & Vos, M. (2015). How and Why Some Issues Spread Fast in Social Media. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 5(1). <https://doi.org/10.29333/ojcm/2497>
- Zhang, B., & Vos, M. (2019). How and Why Some Issues Spread Fast in Social Media. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 5(1), 90–113. <https://doi.org/10.29333/ojcm/2497>